



### Research Article

## Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi

Lailatul Berliana<sup>1</sup>, Siti Nurhalizah<sup>2</sup>, Nasya Amelia Putri<sup>3</sup>, Mashudi<sup>4</sup>

1. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; [lalaberliana3@gmail.com](mailto:lalaberliana3@gmail.com)
2. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; [nasyap349@gmail.com](mailto:nasyap349@gmail.com)
3. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; [salisaza05@gmail.com](mailto:salisaza05@gmail.com)
4. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; [Mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id](mailto:Mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 26, 2025

Revised : April 17, 2025

Accepted : May 19, 2025

Available online : June 17, 2025

**How to Cite:** Lailatul Berliana, Siti Nurhalizah, Nasya Amelia Putri, & Mashudi. (2025). Indonesian Political System Post Reformation. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 143-151. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i3.81>

### Indonesian Political System Post Reformation

**Abstract.** This article discusses the changes and developments in the political system in Indonesia after the reformation. The reformation brought significant changes in the distribution of power and the repositioning of a more democratic political system, including direct elections for regional heads and members of the DPR/DPRD and DPD. However, the implementation of a better system faces challenges, especially in understanding and utilizing the distribution of power at the local level, which is often accompanied by a culture of corruption. This article also highlights the role of society in promoting political stability through intergenerational mobility and how the Indonesian political system adapts to external and internal influences.

**Keywords:** political system; the allocation of value; the repositioning of the political system.

**Abstrak.** Artikel ini membahas perubahan dan perkembangan sistem politik di Indonesia pasca reformasi. Reformasi membawa perubahan signifikan dalam distribusi kekuasaan dan reposisi sistem politik yang lebih demokratis, termasuk pemilihan langsung kepala daerah serta anggota DPR/DPD dan DPD. Meskipun demikian, implementasi sistem yang lebih baik menghadapi tantangan, terutama dalam memahami dan memanfaatkan distribusi kekuasaan di tingkat lokal, yang sering kali disertai oleh budaya korupsi. Artikel ini juga menyoroti peran masyarakat dalam mendorong stabilitas politik melalui mobilitas intergenerasi dan bagaimana sistem politik Indonesia beradaptasi dengan pengaruh eksternal dan internal.

**Kata kunci;** sistem politik; alokasi nilai; reposisi sistem politik.

## PENDAHULUAN

Banyak negara telah mengalami transformasi setelah sejarah yang panjang; beberapa bahkan mengalami transformasi yang cepat. Alasan di balik ini adalah bahwa negara-negara ini mencari solusi yang lebih baik yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Meneliti pro dan kontra dari sistem politik saat ini adalah cara terbaik untuk menghadapi perubahan, yang pada dasarnya tidak berbahaya. Menciptakan kondisi yang lebih baik adalah apa yang dimaksud dengan perubahan dalam konteks ini. Perubahan mungkin tidak selalu menjadi lebih baik, bekas Yugoslavia dan negara-negara Balkan adalah contoh utama. Sistem politik di negara-negara Balkan sangat lemah sebelum jatuhnya Uni Soviet sehingga tidak mampu menahan tekanan besar yang mengikutinya. Akibatnya, kawasan tersebut mengalami serangkaian krisis politik.

Mampu bertahan hidup dengan sistem politik saat ini adalah suatu keharusan mutlak, tetapi juga benar bahwa sistem politik dapat mengalami perubahan sistemik. Baik di dalam maupun luar negeri, perubahan dapat memberikan tekanan pada sistem politik. Sistem politik asing akan selalu berdampak pada sistem Indonesia karena merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, yang paling penting adalah sejauh mana sistem politik dapat beradaptasi dan mempertahankan kehidupan nasional dan negara. Ketidacukupan atau ketiadaan perubahan yang dituntut oleh berbagai kelompok dalam suatu sistem politik sering kali menjadi akar masalahnya.<sup>1</sup>

Tekanan politik internal dan eksternal dapat melemahkan sistem politik yang seharusnya kuat. Dari satu era ke era berikutnya, sistem politik akan terus tertekan. Sebagai negara dengan sistem politik terbuka, Indonesia akan sangat terpengaruh dan perlu beradaptasi. Setelah bertahun-tahun mengalami kontrol internal yang ketat, sistem politik Tiongkok secara bertahap mulai terbuka, meskipun dengan hati-hati. Untuk lebih memperhatikan sistem politik negara tersebut, Tiongkok dapat mencontoh cara mengatur sistemnya. Akibatnya, Tiongkok mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem politik internasional. Di sisi lain, sistem politik Amerika terus-menerus berusaha untuk mewarnai negara-negara asing secara

---

<sup>1</sup> Maksudi, Beddy Iriawan. (2013). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

ideologis. Amerika Serikat akan selalu memandang negara asing mana pun yang tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengannya sebagai negara yang tidak demokratis. Amerika Serikat memandang peristiwa melalui sudut pandang kepentingan nasionalnya sendiri; Misalnya, pemilihan presiden langsung di Iran dan kemenangan Hamas dalam pemilihan Palestina dianggap tidak demokratis. Karena Amerika Serikat tidak ingin Hamas memenangkan pemilihan Palestina dan Mahmud Ahmad Dinejad memenangkan pemilihan presiden Iran, proses demokrasi yang berlangsung di kedua negara tersebut dianggap membahayakan tatanan internasional.

Ketika suatu negara meluangkan waktu untuk menemukan potensinya sendiri, ia dapat memperkuat sistem politiknya dengan sumber dayanya sendiri. Sistem politik dapat diperkuat dari dalam dan luar dengan memanfaatkan kemampuan internalnya. Tekanan internal dan eksternal sama-sama kuat, sehingga kapasitas sistem politik untuk melindungi dirinya sendiri sangat penting. Menurut Juliansyah, tekanan domestik cenderung berfokus pada reformasi yang didorong oleh warga negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang lebih baik, tetapi menjadi bumerang jika reformasi tidak memiliki jalur yang jelas untuk mencapai tujuannya.<sup>2</sup>

Analisis sebelumnya memperjelas bahwa tekanan domestik lebih berasal dari keinginan untuk berubah dan bahwa tekanan asing lebih sering ditujukan untuk memajukan kepentingan negara lain, sering kali dengan agenda perubahan yang sejalan dengan prioritas negara tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

David Easton mendefinisikan sistem politik sebagai “proses alokasi nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat.” Sistem politik dipahami sebagai sebuah mekanisme yang mengatur hubungan antara input berupa tuntutan dan dukungan masyarakat, serta output berupa kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat. Definisi ini menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga otoritatif dalam mendistribusikan nilai-nilai dan mempertahankan kestabilan sistem melalui umpan balik.

Almond dan Powell mendefinisikan sistem politik sebagai himpunan interaksi, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, yang berfungsi mengintegrasikan dan menyesuaikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sistem politik mencakup input (permintaan dan dukungan) dan output (kebijakan) yang saling memengaruhi.

Menurut Dahl, sistem politik adalah pola interaksi yang melibatkan hubungan antara otoritas, distribusi sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini mencerminkan struktur kekuasaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah negara.

Huntington memandang sistem politik sebagai tatanan yang mencakup organisasi, prosedur, dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan mengalokasikan sumber daya dalam suatu masyarakat. Stabilitas sistem politik bergantung pada kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.

---

<sup>2</sup> Elvi Juliansyah, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 39.

Sistem politik sering didefinisikan sebagai gabungan lembaga, proses, dan aturan yang mengelola hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan mencapai tujuan kolektif, memelihara stabilitas, dan merespons tuntutan masyarakat.

Reformasi adalah proses perubahan secara terencana dan sistematis untuk memperbaiki sistem, kebijakan, atau institusi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau zaman. Reformasi bertujuan menciptakan kondisi yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan (Huntington, 1968).

Dalam konteks politik, reformasi diartikan sebagai transformasi struktur kekuasaan, aturan hukum, dan mekanisme pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Giddens, 1991). Reformasi sering kali menjadi respons terhadap krisis politik atau ekonomi.

Pasca-reformasi merujuk pada periode setelah pelaksanaan reformasi, ditandai dengan dinamika dan transformasi politik, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, pasca-reformasi dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 dan mencakup berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan, kebijakan, dan kehidupan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Berikut adalah metode penelitian yang dapat diterapkan dalam studi tentang sistem politik Indonesia pasca reformasi, Pendekatan kualitatif deskriptif: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sistem politik Indonesia setelah reformasi secara mendalam, dengan menggambarkan kondisi politik yang terjadi. Pendekatan ini cocok karena mengutamakan pemahaman terhadap konteks dan interpretasi dari fenomena yang diamati.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel, dan dokumen resmi terkait dengan sistem politik Indonesia. Studi ini akan mengeksplorasi perkembangan struktur politik setelah reformasi. Mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku-buku teori politik seperti yang diusulkan oleh David Easton, serta publikasi yang membahas reformasi dan perubahan sistem politik di Indonesia.

Data dianalisis dengan memeriksa dokumen dan sumber literatur untuk menemukan pola-pola umum, tema-tema kunci, serta dinamika yang terjadi dalam sistem politik Indonesia. Fokus pada reposisi sistem politik.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Politik**

Sistem politik, seperti halnya sistem kehidupan lainnya, mempunyai ciri-ciri integrasi, keteraturan, kesatuan, organisasi, kohesi, keterhubungan dan saling ketergantungan bagian-bagiannya. Ada banyak definisi yang mencoba menjelaskan sistem politik Indonesia, antara lain sebagai berikut.

- Sistem politik Indonesia merupakan sekumpulan interaksi yang disarikan dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarluaskan dalam masyarakat dan negara Indonesia. Menurut pemahaman tersebut, lingkungan internal masyarakat akan mempengaruhi sistem politik Indonesia, antara lain:

Landasan ro haniah bangsa, fasafah Negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai.

- Sistem politik Indonesia adalah sekumpulan atau total kegiatan berbeda dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penetapan tujuan, upaya mencapai tujuan, pengambilan keputusan, pemilihan dan penyusunan skala prioritas.

- Sistem politik Indonesia diterapkan di Indonesia pada seluruh proses, baik seluruhnya maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia bisa mengacu pada sistem yang dulu diterapkan di Indonesia, yang berlaku saat ini di Indonesia atau yang berlaku pada berdirinya negara Indonesia sampai saat ini.

- Sistem politik Indonesia dijalankan sebagai suatu mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara dan ketentuan konstitusi, dengan tetap memperhatikan lingkungan masyarakat yang sebenarnya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, antara lain faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan kondisi perekonomian suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik yang memegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Dengan demikian, David Easton berpendapat bahwa sistem politik adalah kehidupan politik, yaitu suatu sistem interaksi yang ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat.

Menurut Rusadi, hakikat negara Indonesia mengandung unsur filosofis, gagasan, cita-cita, nilai, doktrin atau gagasan yang melekat pada diri Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan tipikal sistem politik Indonesia yang bercirikan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai Proklamasi, Bhinneka Tunggal Ika dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sistem politik pada Indonesia bisa diinterpretasikan, baik menjadi semua proses sejarah menurut ketika berdirinya negara Indonesia hingga dewasa ini juga hanya pada periode eksklusif menurut proses bepergian sejarah. Dalam fenomena sejarahnya, bisa dijumpai.

## 2. Sistem Politik Pasca Reformasi

Sistem politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa Orde Lama dan Orde Baru. Masyarakat tidak dapat membangun dirinya sendiri atau berpartisipasi dalam pembentukan sistem politik yang stabil karena peran elit yang terlalu besar, yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah yang belum terpecahkan. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari sistem politik saat ini, orang-orang atau masyarakat luas menentukan bagaimana sistem itu beroperasi. Dukungan yang tinggi dari berbagai peran dalam sistem politik diperlukan untuk kekuatan sistem, menurut Nico Schulte Nordholt (dalam Juliansyah). Kondisi bangsa dan negara Indonesia masih sangat kurang jika dibandingkan dengan lima kriteria yang digariskan oleh Linz dan Stepan. Dalam menuju sistem demokrasi, kelima syarat tersebut harus terpenuhi. Pertama, harus ada masyarakat madani yang bebas dan

aktif. Kedua, masyarakat yang bermotif politik, yang mencakup elit partai dan mandiri secara fungsional. Ketiga, kelompok kepolisian. Dan terakhir, birokrasi yang terorganisasi yang terdiri dari para ahli. Kelima, sistem ekonomi berbasis pasar yang beroperasi secara independen dari negara.

Terdapat lingkungan yang terbuka dan mengundang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara politik dalam membentuk masa depan negara dan bangsa. Dalam hal membangun masyarakat yang dapat mengendalikan nasibnya sendiri, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memutuskan bagaimana cara melanjutkannya. Tugas warga negara tidak hanya sekadar berpartisipasi dalam pemerintahan dengan melakukan hal-hal seperti memberikan suara yang terinformasi dalam pemilihan umum dan meminta pertanggungjawaban atas pilihan yang mereka buat. Di sini, program kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya pemerintah berfungsi sebagai katalisator bagi pengembangan masyarakat sipil yang lebih berdaya. Masyarakat tidak sekadar tidak melakukan apa-apa sambil menunggu tindakan dari pemerintah. Sebaliknya, menurut paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,..." pemerintah memandang masyarakat sebagai sekutu dalam mencapai tujuan negara.

Saat Indonesia memulai era baru dengan sistem politik yang lebih transparan, peran partai politik menjadi sangat penting. Ada banyak faktor di luar sistem politik yang memengaruhi partai politik dan elit. Masalah saat ini adalah elit politik dan partai kurang percaya diri dalam menentukan sikap, sehingga mereka sangat bergantung pada dukungan luar, mirip dengan apa yang terjadi di bawah Orde Baru. Karena budaya dukungan ini, partai politik dan elit tidak dapat secara independen membentuk opini publik dan sifat persaingan politik. Sangat penting bagi partai politik dan elit untuk mempertahankan otonomi mereka dari pemerintah sehingga mereka tidak terlalu bergantung padanya untuk apa pun, termasuk pembentukan koalisi dan partai oposisi. Untuk menjaga agar kepentingan rezim yang berkuasa tidak tercemar oleh kepentingan rakyat, partai politik harus mengumpulkan keberanian untuk memutuskan sikap mereka. Ada sistem checks and balances yang berfungsi dalam sistem politik ketika oposisi mampu mengawasi dan mengendalikan kekuasaan. Ada kekhawatiran bahwa tindakan ekstra-parlementer yang bertujuan untuk menekan pemerintah dapat meningkat frekuensinya jika hal ini gagal terjadi.

Masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik, karena memungkinkan elit politik untuk melaksanakan hasil keputusan politik dengan tepat. Pilihan yang diambil untuk memastikan kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat penting untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh para politisi. Masyarakat mulai menyadari bahwa hukum bukanlah senjata politik karena hukum ditegakkan sesuai dengan standar hukum yang relevan. Kebenaran, keadilan, dan kepentingan bersama dijamin ditegakkan melalui penerapan instrumen yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bias, melainkan didasarkan pada bukti dan pertimbangan hukum.

Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam penegakan hukum berpedoman pada komitmen terhadap keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Oleh karena itu, politik memerlukan hukum untuk membangun rasa kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia; hukum ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat politik. Dalam negara demokrasi, supremasi hukum ditetapkan melalui pembuatan dan penegakan hukum dengan tujuan untuk menjamin keselamatan semua warga negara dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

Jika kepentingan birokrasi dan politik dipisahkan, pemerintah dapat berfungsi. Tujuan pembentukan birokrasi adalah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab politik yang telah ditentukan sebelumnya. Birokrasi yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk kelancaran operasi pemerintah. Jika demokrasi terbuka dan transparan, peran dan tanggung jawab birokrasi mudah terlihat. Ini menyiratkan bahwa birokrasi memainkan peran yang lebih besar dalam menjalankan kebijakan politik dan lebih sedikit dalam proses politik secara keseluruhan. Bagaimana membangun dasar sistem politik yang demokratis menjadi perhatian utama. Dalam kebanyakan kasus, elit penguasa memutuskan untuk melembagakan reformasi demokratis karena mereka percaya bahwa memperjuangkan kepentingan mereka dalam jangka panjang akan lebih mudah dalam suasana demokratis, kata Alfred Stepan. Meskipun demikian, sejumlah kecenderungan biasanya dihasilkan oleh jalur reformasi yang menanjak. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang berkuasa dapat menghentikan demokratisasi jika mereka menginginkannya. Biaya penindasan jauh lebih tinggi daripada biaya untuk menangani masalah yang muncul selama liberalisasi. Kedua, demokrasi terbatas cenderung muncul sebagai hasil dari demokratisasi dari atas, yang terkait dengan pelestarian kepentingan elit. Ketiga, promosi demokrasi terhambat secara signifikan karena militer akan terus berupaya melindungi hak-hak mereka.

Akan ada perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan mahasiswa dalam hal reformasi. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab harus berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Faktor-faktor ini, karena berbagai alasan, tidak berfungsi untuk melegitimasi perilaku pemerintah (penguasa) semata-mata untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, baik melalui kegiatan demokrasi yang mahal, stabilitas politik melalui penyederhanaan partai politik, atau penghapusan peran DPR. Dengan kata lain, tidak dapat diterima jika orang yang bertanggung jawab hanya peduli untuk mempertahankan posisi kekuasaan mereka, terutama jika ini dicapai melalui cara-cara yang kurang manusiawi yang menyakiti rakyat. Sementara beberapa lembaga berkembang pesat di era demokrasi, yang lain, terutama yang terlibat dalam militer, menemukan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan karena ruang lingkup terbatas di mana mereka dapat memengaruhi keputusan politik.

Menurut mereka, biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang berkuasa karena bersedia menyerahkan sebagian wewenang mereka agar diawasi oleh pihak lain terlalu tinggi. Banyak politisi yang berkuasa akhirnya memilih tindakan otoriter. Sebenarnya, mereka yang berkuasa lebih menyadari konsekuensinya ketika mereka

menindas kelompok yang mereka anggap menentang kebijakan mereka. Elit politik biasanya mengembangkan demokrasi semu dengan mengadopsi kebijakan dan praktik yang tampak demokratis untuk memperkuat kekuasaan mereka dan memastikan keberlanjutannya. Satu-satunya alasan demokrasi semacam ini dipraktikkan adalah untuk menetapkan batasan bagi komunitas atau kelompok yang bertindak seolah-olah mereka berpartisipasi dalam demokrasi. Beberapa anggota elit politik membagikan sebidang tanah kepada militer sehingga mereka dapat menduduki wilayah yang dianggap penting secara ekonomi dan politik secara strategis. Tujuan dari tindakan ini bukanlah demokrasi ideal yang diinginkan di tingkat nasional dan negara bagian, melainkan pencapaian demokrasi semu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

lingkungan sekitar, termasuk faktor-faktor yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan sistem politik, memiliki dampak pada sistem politik. Sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya, sistem politik tunduk pada berbagai tingkat tekanan. Alih-alih menjadi wadah kosong di hamparan luas, sistem politik seperti kanvas kosong yang menunggu untuk diisi. Lingkungan sekitar memiliki banyak pengaruh pada sistem politik. Ada korelasi yang kuat antara nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dan lingkungan yang membentuk sistem politiknya. Sistem politik dapat mengambil corak, pola, dan kepribadian dari bagian-bagian penyusunnya sesuai dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan budaya yang dianut oleh para anggotanya.

Mengapa Indonesia kini menjadi bagian dari sistem politik global adalah karena Indonesia merupakan negara Non-Blok, yang merupakan produk dari proses politik internasional, yang merupakan alat untuk mengubah sistem politik. Arus informasi yang lebih lancar ke dalam sistem politik yang mapan telah dihasilkan dari globalisasi perdagangan. Internet dan media televisi internasional merupakan dua sarana penyebaran informasi yang paling efisien di zaman modern. Karena orang-orang di seluruh dunia dapat mendengar tentang hal yang sama yang sedang terjadi saat ini, waktu dan ruang tidak lagi menjadi penghalang. Fungsi masukan dari sistem politik dunia internasional memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, dan kondisi seperti ini membuat bangsa dan negara Indonesia rentan terhadap pengaruh ini.

### **Saran**

Penelitian menunjukkan bahwa setelah reformasi, sistem politik Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan, khususnya mengenai alokasi kekuasaan dan tingkat partisipasi publik. Meskipun demikian, pemerintah harus menanggapi dengan serius berbagai masalah seperti korupsi yang merajalela di tingkat daerah, ketidaktahuan masyarakat umum tentang politik, dan lembaga politik lokal yang tidak memadai.

1. Pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu lebih fokus pada pendidikan politik yang merata, terutama di daerah, untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

2. Penguatan institusi politik lokal diperlukan untuk memastikan distribusi kekuasaan yang lebih efektif dan mengurangi peluang praktik korupsi.
3. Masyarakat sipil harus didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat.
4. Pengembangan demokrasi harus tetap dijaga dengan memperkuat sistem check and balance, sehingga berbagai kepentingan politik dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
5. Reformasi birokrasi perlu dilanjutkan untuk mendukung profesionalisme dan efektivitas dalam menjalankan kebijakan politik yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Easton, David. (1957). *Empirical Conceptualizations: An Approach to the Analysis of Political System*, Boston: Holbrook Press.
- Easton, David. (1967). *The Political System*, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Easton, David. (1982). *Analisa Sistem Politik, Dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew (Ed). Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press.
- Juliansyah, Elvi. (2013). *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Maksudi, Beddy Iriawan. (2013). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukarna. (1977). *Sistem Politik*, Bandung: Alumni.
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara.